

TESIS
HARMONISASI PENGATURAN PERLINDUNGAN ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA

UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN
GUNA MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM
PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



Oleh :

NABILA AULIA NURAHMA
NPM : 24310009

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2025

TESIS

**HARMONISASI PENGATURAN PERLINDUNGAN ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK,
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL, DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**



Oleh :

NABILA AULIA NURAHMA

NPM : 24310009

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2025

TESIS

HARMONISASI PENGATURAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Dipersiapkan dan disusun oleh:

NABILA AULIA NURAHMA
NPM : 24310009

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 8 Desember 2025

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

Dr. Ria Tri Vinata, S.H., L.L.M.

Dr. Hari Wibisono, S.H., M.H.

Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.

Dr. Raden Besse Kartoningrat, S.H., M.H.

Tanda Tangan

.Ketua

`Anggota

`Anggota

`Anggota

`Anggota

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar Magister
Tanggal 8 Desember 2025

Ketua Program Studi Hukum Program Magister



Dr. Ardhiwinda Kusumaputra, S.H., M.H.

TESIS

HARMONISASI PENGATURAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK,
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Diajukan Oleh :

NABILA AULIA NURAHMA

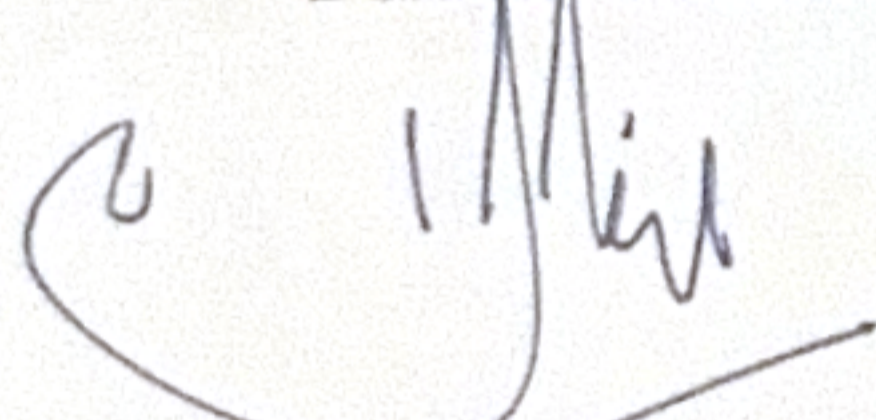
NPM : 24310009

Tesis Ini Telah disetujui untuk diuji

Tanggal 8 Desember 2025

Oleh :

PEMBIMBING I



Dr. Titik Suharti, S.H., Hum.

PEMBIMBING II



Dr. Raden Besse Kartoningrat, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Pada

Program Magister

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Ardhiwinda Kusumaputra, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Harmonisasi Pengaturan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Suami Penulis, Pratama Alifiandi Martio, S.H., telah menjadi support system utama penulis, selalu menemani dan membimbing Penulis.
2. Orang Tua Penulis, Bapak H. Andri Yusufiana Sambas, S.E., M.M., Ibu Melia Wulansari, ST., Ibu Muhana Sulistyaningsih, Serta Kedua Mertua Penulis yakni Bapak H. Sulistiyo, S.H., M.H., dan Ibu Mariya, yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan motivasi untuk penulis.
3. Ibu Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Prof. Dr. Ir. Rr. Nugraini Susantina Wisnujati, M.Si.
4. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., C.P.M., Adv.
5. Bapak Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Ardhiwinda Kusumaputra, S.H., M.H.
6. Ibu Dosen Pembimbing I, Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum. dan Dosen Pembimbing II, Dr. Raden Besse Kartoningrat, S.H., M.H., yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan tesis ini.
7. Seluruh Dosen Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Hukum serta semua pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga tesis ini dapat memberikan

manfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 22 Desember 2025

Nabila Aulia Nurahma
NPM : 24310009

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nabila Aulia Nurahma
NPM : 24310009
Alamat : Jl. Dukuh Kupang XXIX No. 61
No. Telp (HP) : 081213091715

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul “**HARMONISASI PENGATURAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur *plagiarism maupun autoplaiarisme*, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 22 Desember 2025

Yang menyatakan,



Nabila Aulia Nurahma, S.H.
NPM : 24310009

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	11
E. Kajian Teoritis	11
1. Harmonisasi Hukum	11
2. Asas-Asas Hukum Yang Terkait Dengan Keberlakuan Peraturan Perundang-Undangan	12
3. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual.....	15
4. Kekerasan Seksual	16
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	17
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana	18
F. Metode Penelitian.....	19
1. Tipologi Penelitian	20

	2. Metode Pendekatan.....	20
	3. Bahan Hukum	21
	4. Analisis Bahan Hukum	22
	G. Pertanggungjawaban Sistematika.....	22
BAB II	SINKRONISASI PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA....	24
	2.1. Prinsip dan Landasan Hukum Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia	24
	2.2. Pengaturan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Hukum Indonesia.....	32
	2.2.1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak	32
	2.2.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	38
	2.2.3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	43
	2.3. Analisa Sinkronisasi Pengaturan Antar Undang-Undang.....	50
BAB III	HAMBATAN-HAMBATAN YANG MENGAKIBATKAN TERJADINYA POTENSI DISHARMONI ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, UNDANG-UNDANG NOMOR 12	

**TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.... 70**

3.1. Konsep Disharmoni Hukum dalam Sistem Peraturan Perundang-
Undangan 70

3.2. Disharmoni Substansi Antar Undang-Undang..... 75

3.3. Hambatan-Hambatan Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-
Undangan 95

3.4. Implikasi Ketidakharmisan Pengaturan Terhadap Perlindungan
Anak Korban Kekerasan Seksual..... 106

BAB IV PENUTUP113

4.1. Kesimpulan113

4.2. Saran114

DAFTAR BACAAN

ABSTRAK

Pengaturan perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam hukum nasional tersebar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keberagaman pengaturan tersebut mencerminkan komitmen negara dalam melindungi anak sebagai kelompok rentan, namun perbedaan norma terkait definisi, bentuk perlindungan, dan mekanisme penegakan hukum berpotensi menimbulkan disharmoni yang dapat menghambat efektivitas perlindungan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum terdiri atas peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer serta literatur dan doktrin hukum sebagai bahan hukum sekunder, yang dianalisis secara kualitatif untuk menilai keselarasan dan konsistensi pengaturan perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam ketiga undang-undang tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga undang-undang tersebut pada prinsipnya saling melengkapi dalam membangun sistem perlindungan anak korban kekerasan seksual yang komprehensif, dengan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar perlindungan khusus, Undang-Undang TPKS sebagai *lex specialis* yang menekankan pemulihan korban, dan KUHP Nasional sebagai kerangka pidana umum. Namun demikian, masih terdapat potensi disharmoni akibat perbedaan definisi, unsur delik, ancaman pidana, serta mekanisme perlindungan dan pemulihan korban, yang diperparah oleh lemahnya koordinasi kelembagaan dan hambatan sosiologis. Oleh karena itu, harmonisasi norma dan penguatan koordinasi antarinstansi menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan perlindungan anak korban kekerasan seksual yang efektif, konsisten, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Perlindungan anak; kekerasan seksual; harmonisasi hukum; Undang-Undang TPKS; KUHP Nasional.

ABSTRACT

The regulation of protection for child victims of sexual violence within Indonesia's national legal system is dispersed across Law Number 35 of 2014 on Child Protection, Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, and Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code. This diversity of regulations reflects the State's commitment to protecting children as a vulnerable group; however, differences in legal norms concerning definitions, forms of protection, and law enforcement mechanisms have the potential to create disharmony that may hinder the effectiveness of legal protection.

This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary sources in the form of relevant legislation and secondary sources derived from legal literature and scholarly doctrines, which are qualitatively analyzed to assess the coherence and consistency of regulations governing the protection of child victims of sexual violence across the three laws.

*The findings indicate that the three laws are fundamentally complementary in establishing a comprehensive protection system for child victims of sexual violence, with the Child Protection Law serving as the basis for special protection, the Sexual Violence Crimes Law functioning as *lex specialis* with an emphasis on victim recovery, and the Criminal Code providing the general criminal law framework. Nevertheless, potential disharmony remains due to differences in definitions, offense elements, criminal sanctions, and protection and recovery mechanisms, exacerbated by weak institutional coordination and sociological barriers. Therefore, normative harmonization and strengthened inter-agency coordination are essential prerequisites for ensuring effective, consistent, and just protection for child victims of sexual violence.*

Keywords: *Child protection; sexual violence; legal harmonization; Sexual Violence Crimes Law; National Criminal Code.*